

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua memuat cita-cita nasional yaitu “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Sedangkan pada alinea keempat menyatakan tujuan nasional yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, berarti mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik secara ekonomi maupun spiritual.

Negara Indonesia masih mengalami permasalahan kemiskinan dan belum terselesaikan sampai saat ini. Kemiskinan merupakan masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah. Sehingga program pembangunan selalu mengikutsertakan dan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. Dilansir dari website resmi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) disebutkan bahwa dalam rapat terbatas 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan rapat terbatas 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, Presiden mengumumkan instruksi agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif, terarah dan tepat

sasaran. Sehingga, kemiskinan ekstrim dapat mencapai nol persen pada tahun 2024.

Indonesia dikenal sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sehingga daerah mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan atau mengatur pemerintahan dan juga kepentingan rakyatnya sendiri berdasarkan kondisi setempat. Hal ini bertujuan untuk memperlancar pencapaian tujuan Negara Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat.

Isi Program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia salah satunya adalah pembangunan Indonesia melalui pemberdayaan desa atau daerah pinggiran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Nuraini et al. (2021), negara Indonesia terdiri dari 83.813 desa, diantaranya 39.091 desa berstatus tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Desa merupakan wilayah organisasi atau tatanan pemerintahan terkecil dan terendah karena lebih dekat atau berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa berperan penting sebagai ujung tombak dalam mewujudkan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak

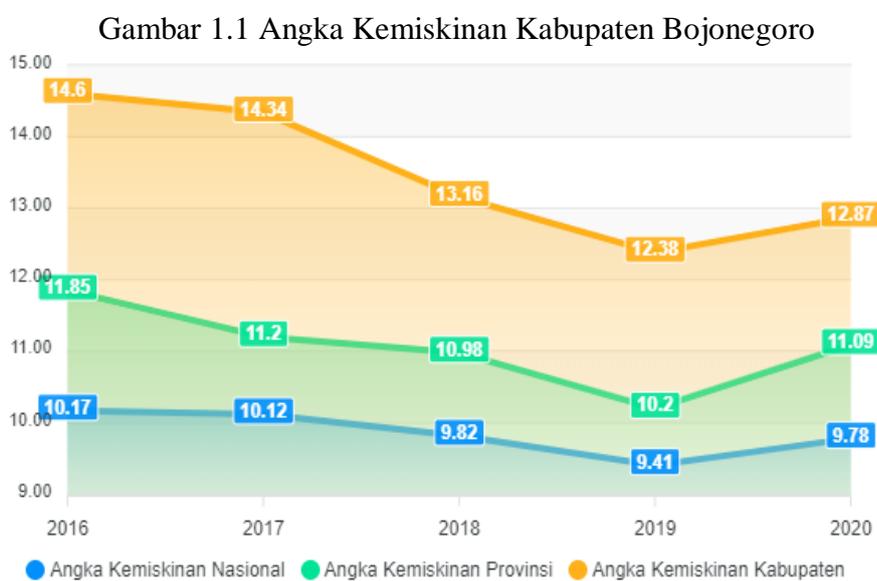
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk menyelenggarakan pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat.

Desa memiliki lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian desa. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa: “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa”. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUM Desa bertujuan untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Pembentukan BUMDesa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa menjadi aspek penting memperkuat perekonomian desa (Anastasia et al., 2021). Melalui BUM Desa yang mampu mengembangkan dan mengelola potensi masing-masing di daerahnya, dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Soleh (2017) berpendapat bahwa pengembangan potensi desa bertujuan untuk

mendorong terciptanya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan, pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu contoh daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Meskipun Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil minyak, namun kenyataannya kemiskinan masih cukup tinggi. Bahkan Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori zona merah karena kemiskinannya masih melebihi angka kemiskinan provinsi Jawa Timur setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat memilih Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu *pilot project* penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021. Menurut situs Satu Data Kabupaten Bojonegoro, angka kemiskinan meningkat pada tahun 2020.



Sumber: data.bojonegorokab.go.id

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggalakkan keberadaan BUM Desa di setiap desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan terkait BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09

Tahun 2010 tentang Desa. Pada tanggal 3 Februari 2021, Bupati Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain kebijakan, salah satu bentuk dukungan Pemkab Bojonegoro terhadap pengembangan BUM Desa yaitu dengan memberikan bantuan senilai 100 juta kepada seluruh BUM Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan laporan dari website dinkominfo.bojonegorokab.go.id, pada tahun 2019 sebanyak 93 BUM Desa yang mendapatkan bantuan, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 38 BUM Desa, sehingga total 131 BUM Desa yang mendapatkan bantuan.

Perkembangan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing desa. Dengan adanya kemampuan untuk memanfaatkan potensi desa menjadi suatu usaha, maka dapat meningkatkan perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pj. Yayan Rohman, Sekretaris Kabupaten Bojonegoro, pada acara Pelatihan dan Pembinaan Pengelolaan Manajemen BUM Desa yang mempertemukan seluruh BUM Desa di Bojonegoro pada Rabu, 28 November 2018 yang termuat dalam artikel website Kabupaten Bojonegoro:

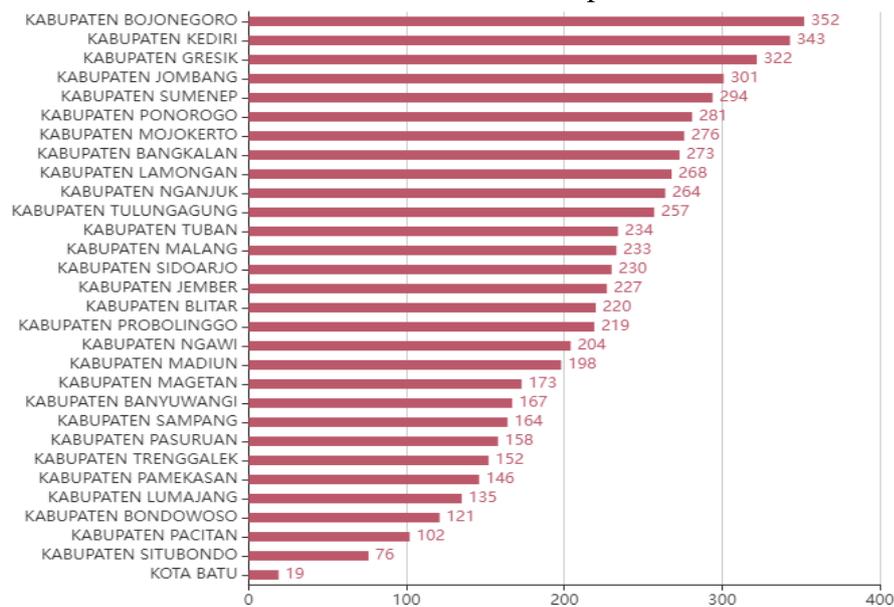
“Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan BUM Desa harus mampu menggali sekaligus mengeksplorasi sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PADes.” kata Yayan Rohman, Pj. Sekda Kabupaten Bojonegoro.

(Sumber: <https://bojonegorokab.go.id/berita/3536/keberadaan-bumdes-dapat-tingkatkan-perekonomian-desa>, diakses pada 08 Januari 2022 pukul 09.03 WIB)

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 419 desa dengan total 352 desa sudah memiliki BUM Desa atau sekitar 84%. Hal ini membuat Kabupaten Bojonegoro menempati urutan pertama dengan jumlah BUM Desa terbanyak di Jawa Timur.

Menurut artikel di situs blokbojonegoro.com, Kabupaten Bojonegoro dinobatkan sebagai pemenang lomba BUM Desa tiga kali berturut-turut. Selain itu, BUM Desa Bojonegoro masuk dalam kategori 30 BUM Desa Terbaik di Jawa Timur pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

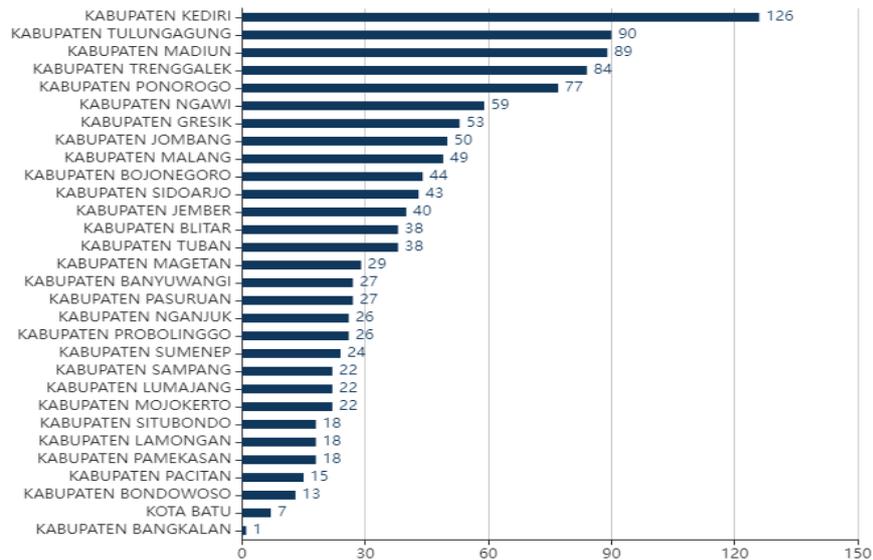
Gambar 1.2 BUM Desa Berdasarkan Kabupaten di Jawa Timur



Sumber: datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id

Sebanyak 12,5% atau 44 dari 352 BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori maju. Rendahnya BUM Desa dalam kategori maju disebabkan masih banyak desa yang gagal melihat potensi yang ada. Sehingga banyak BUM Desa yang tidak mengetahui jenis usaha apa yang bisa dijalankan dan dikembangkan. Menurut Agunggunanto dkk. dalam Soejono et al. (2021), banyak desa yang gagal melaksanakan BUM Desa karena rendahnya tingkat kemampuan desa dan minimnya potensi desa. Sedangkan menurut Mawung & Mantikei (2020), faktor penting dalam perkembangan BUM Desa adalah menentukan jenis usahanya.

Gambar 1.3 Klasifikasi BUM Desa di Jawa Timur



Sumber: datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id

BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro yang dinilai berhasil dan menduduki klasifikasi sebagai BUM Desa maju adalah BUM Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo. BUM Desa Pejambon didirikan pada tahun 2004 dengan dilatarbelakangi prakarsa Perangkat Desa dalam acara Musyawarah Desa (Musdes), karena melihat keadaan keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sangat minim dan terdapat potensi desa yang bisa dikembangkan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo, BUM Desa Pejambon diberi nama “Sarana Mandiri” dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

BUM Desa “Sarana Mandiri” awalnya tidak mampu memanfaatkan potensi desa sebagai peluang bisnis. Sehingga BUM Desa “Sarana Mandiri” tidak berkembang dan hanya bisa menyumbang PADes sebesar Rp. 1.000.000 setiap tahun. Pada tahun 2017, pemerintah desa Pejambon memiliki rencana untuk mewujudkan desa wisata yang dituangkan dalam *Master Plan* Wisata Desa. Kemudian pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur organisasi sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 35 Tahun 2018. Dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, BUM Desa “Sarana Mandiri” saat ini memiliki 4 unit usaha antara lain sebagai berikut:

1. Unit Internet
2. Unit Desa Wisata
3. Unit Pembayaran Listrik
4. Unit Jasa dan Niaga

Proses pencapaian tujuan organisasi tentu membutuhkan manajemen strategik. Setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang ada. Menurut Buchory dalam Fitriksa (2017),

strategi adalah suatu rencana terpadu yang menyeluruh, komprehensif dan terpadu yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari apa yang terjadi. Sedangkan manajemen strategik adalah seni dan ilmu memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya (David & David, 2019:3). Manajemen strategik dapat membuat organisasi menjadi proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depannya sendiri (David & David 2019:14). Untuk mencapai tujuan, maka BUM Desa “Sarana Mandiri” memiliki manajemen strategik dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah.

Pada tahun 2020, dunia sedang dilanda cobaan secara global akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease* atau biasa dikenal dengan sebutan covid-19. Pada awal Maret 2020 Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa covid-19 telah menjangkiti warga Negara Indonesia. Tingkat penularan virus covid-19 yang sangat cepat mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah orang yang terpapar dan meninggal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia harus memberlakukan sistem *lockdown*. Adanya perubahan lingkungan akibat pandemi covid-19 tersebut memberikan banyak pengaruh atau dampak negatif dalam berbagai sektor, salah satu sektor yang berdampak adalah sektor ekonomi. Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak perusahaan disektor usaha atau UMKM yang tutup karena mengalami kerugian atau gulung tikar. Hal tersebut tentu berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, karena banyak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dampak pandemi covid-19 tidak hanya terlihat di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Banyak usaha desa (BUM Desa) yang merasakan dampak dari pandemi

covid-19. Dalam laporan situs national.kontan.co.id, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menemukan 15.768 BUM Desa terdampak pandemi covid-19, sehingga melakukan penutupan usaha dan merumahkan sekitar 123.176 tenaga kerja.

Pandemi covid-19 juga membuat pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Selain itu, juga menutup akses internasional dari berbagai negara untuk mengurangi proses penyebaran covid-19. Berdasarkan Buku Tren Pariwisata 2021, PSBB dan penutupan akses keluar masuk menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara sehingga berdampak pada penurunan pendapatan pemerintah Indonesia di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar (Kemenparekraf, 2020).

BUM Desa “Sarana Mandiri” merupakan salah satu BUM Desa yang terkena dampak pandemi covid-19 karena salah satu unit usahanya adalah Desa Wisata. Namun, hasil pendapatan BUM Desa “Sarana Mandiri” justru meningkat di masa pandemi. PADes Pejambon dari bagi hasil dengan BUM Desa “Sarana Mandiri” mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2020. Hal ini tentu saja menimbulkan kehebohan di Kabupaten Bojonegoro karena di masa pandemi covid-19 masih bisa menjalankan usahanya dan menghidupkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Desa Pejambon Tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Asli Desa Pejambon	Bagi Hasil BUM Desa
2018	Rp 312.685.000	Rp 1.000.000

2019	Rp 463.875.000	Rp 2.000.000
2020	Rp 458.200.000	Rp 50.000.000
2021	Rp 418.050.000	Rp 10.000.000

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan APBDesa Pejambon Tahun 2018-2021

Roda perekonomian yang sempat menurun secara signifikan selama pandemi covid-19, mengharuskan pemerintah mengambil tindakan. Pada Sabtu, 15 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan *Launching Reopening* tempat wisata di kawasan Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian sektor pariwisata dan budaya di Kabupaten Bojonegoro.

Pada Jumat, 25 September 2020, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meresmikan Wisata Edukasi Pejambon yang dikelola oleh BUM Desa “Sarana Mandiri”. Wisata Edukasi Pejambon merupakan bagian dari program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Inovasi Desa, Desa Pejambon bersama 100 desa lainnya dari seluruh Indonesia berhak mendapatkan dana hibah sebagai pengakuan atau penghargaan prestasi atas pemenang pertama tingkat nasional kategori Desa Terinformatif dalam Pelayanan Publik Tahun 2018.

Wisata Edukasi Pejambon ini memiliki luas kurang lebih 1,5 hektar. Wisata ini memiliki konsep edukasi yang terdiri dari edukasi pertanian dan

outdoor. Untuk edukasi pertanian ada museum pertanian, sedangkan edukasi *outdoor* ada *outbond ground* dan perlengkapan *outbond* untuk TK sampai SMA. Selain itu juga terdapat beberapa wahana penunjang antara lain sepeda motor ATV beserta *tracking*, Wisata Tengan Sawah dengan beberapa spot selfie, kolam renang untuk anak kecil hingga dewasa, tempat parkir, tempat duduk yang nyaman, ruang makan, kamar mandi, kios *souvenir*, restoran, mushola, jalur jogging, dan area Bougenville.

Wisata edukasi Pejambon diharapkan dapat merevitalisasi perekonomian masyarakat pedesaan yang terkena dampak pandemi covid-19. Senada dengan uraian tersebut, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di situs Kementerian Desa, PDTT mengatakan sebagai berikut:

“Ini akan menjadi titik tolak bangkitnya situasi ekonomi akibat pandemi covid-19. Karena hampir seluruh desa mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Karena kunci bangkitnya perekonomian terletak pada desa wisata, bukan pada wisata besar. Oleh karena itu, betapa luar biasanya Desa Pejambon ini telah memberikan satu bagian kontribusi untuk kembali menghidupkan ekonomi pasca pandemi covid-19 melalui desa wisata, namun penting diingat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak, memakai masker dan selalu cuci tangan pakai sabun” kata Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(Sumber: <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3431/gus-menteri-resmikan-desa-wisata-di-bojonegoro>, diakses pada 08 Januari 2022 pukul 11.23 WIB)

Adanya berbagai objek wisata atau wisata edukasi Pejambon dapat mendatangkan keuntungan berupa perputaran ekonomi. Manfaat di bidang ekonomi dirasakan tidak hanya bagi desa, tetapi juga secara langsung bagi masyarakat di desa Pejambon. Pengembangan objek wisata dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat menjadi sarana

pemberdayaan masyarakat di desa dengan mengembangkan UMKM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin dalam buku Gebrakan Bupati Anna Mu'awanah Mendesain Bojonegoro Modern, yang menyatakan:

“Di Desa Pejambon wisata edukasi mempekerjakan sekitar 30 pekerja, dan membuka peluang usaha bagi 20 pedagang di sekitar objek wisata.” kata Machmuddin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro (Dinkominfo Bojonegoro, 2021).

Pendapat terkait manfaat wisata edukasi pejambon terhadap masyarakat juga dikemukakan secara langsung oleh ketua BUM Desa “Sarana Mandiri”. Dilansir dari website Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Andi sebagai ketua BUMDesa Pejambon mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, dengan adanya wisata edukasi ini dapat menghasilkan pendapatan bagi warga desa karena kami menyediakan tempat untuk berjualan. Pemuda yang tergabung dikarang taruna juga bisa mendapat penghasilan dengan membantu BUMDes sebagai operator.” kata Andi Wimratani selaku Ketua BUMDesa Sarana Mandiri, Desa Pejambon. (Sumber: <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3431/gus-menteri-resmikan-desa-wisata-di-bojonegoro>, diakses pada 08 Januari 2022 pukul 11.23 WIB)

Wisata Edukasi Pejambon merupakan satu-satunya desa wisata Kabupaten Bojonegoro yang mewakili dalam event Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wisata Edukasi Pejambon berhasil masuk kedalam 300 besar dari 1.831 desa wisata yang ikut serta dalam acara ADWI 2021. Adanya event ADWI ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan desa wisata.

Pada tahun 2021, BUM Desa “Sarana Mandiri” mendapat Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hibah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur atas prestasi dalam penilaian kriteria Berkembang dan Maju dalam sistem Data Desa Center (DDC). Bantuan Keuangan Khusus merupakan program pemberdayaan BUM Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa pada awal pandemi covid-19 pendapatan BUM Desa “Sarana Mandiri” mampu meningkat. Sedangkan, pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun, BUM Desa “Sarana Mandiri” mampu bertahan dan merevitalisasi perekonomian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses manajemen strategik BUM Desa “Sarana Mandiri” agar tetap menjalankan bisnisnya dan mencapai tujuan di masa pandemi. Kemudian penulis akan menuangkan dengan judul **“Manajemen Strategik BUM Desa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena atau kesenjangan diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Manajemen Strategik BUM Desa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis manajemen strategik BUM Desa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan dan menambah informasi bagi penulis dan pembaca. Sehingga diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran atau pengetahuan terkait manajemen strategik pengembangan organisasi, diantaranya BUM Desa dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Desa di masa pandemi covid-19, khususnya di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. .

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang pendidikan dan bahan komparatif bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b) Bagi BUM Desa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BUM Desa “Sarana Mandiri” untuk menyusun strategi dalam mengelola potensi desa saat menghadapi tantangan atau ancaman yang mungkin muncul, sehingga dapat mencapai tujuannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tambahan

informasi dan pemberian masukan kepada segenap Pengurus BUM Desa “Sarana Mandiri”.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dengan menulis karya ilmiah dan menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.